

LAPORAN KINERJA

Disusun oleh :

BIRO PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Senantiasa Kita panjatkan kehadiran ALLAH SWT, Karena atas izin-Nya, Laporan Kinerja Pemerintah (LKj) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKj) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat hasil pengukuran Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan Ukuran Capaian Kinerja SMART.

Demikian Lapotan Kinerja Pemerintah (LKj) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2024 disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi dan pembinaan implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Semoga ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingannya dan Petunjuknya kepada kita semua dalam menjalankan roda pemerintahan dan Pembangunan untuk kemajuan daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu , 11 Januari 2025

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH**



Drs. DAHRI SALEH M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660311 198803 1 017

BAB I

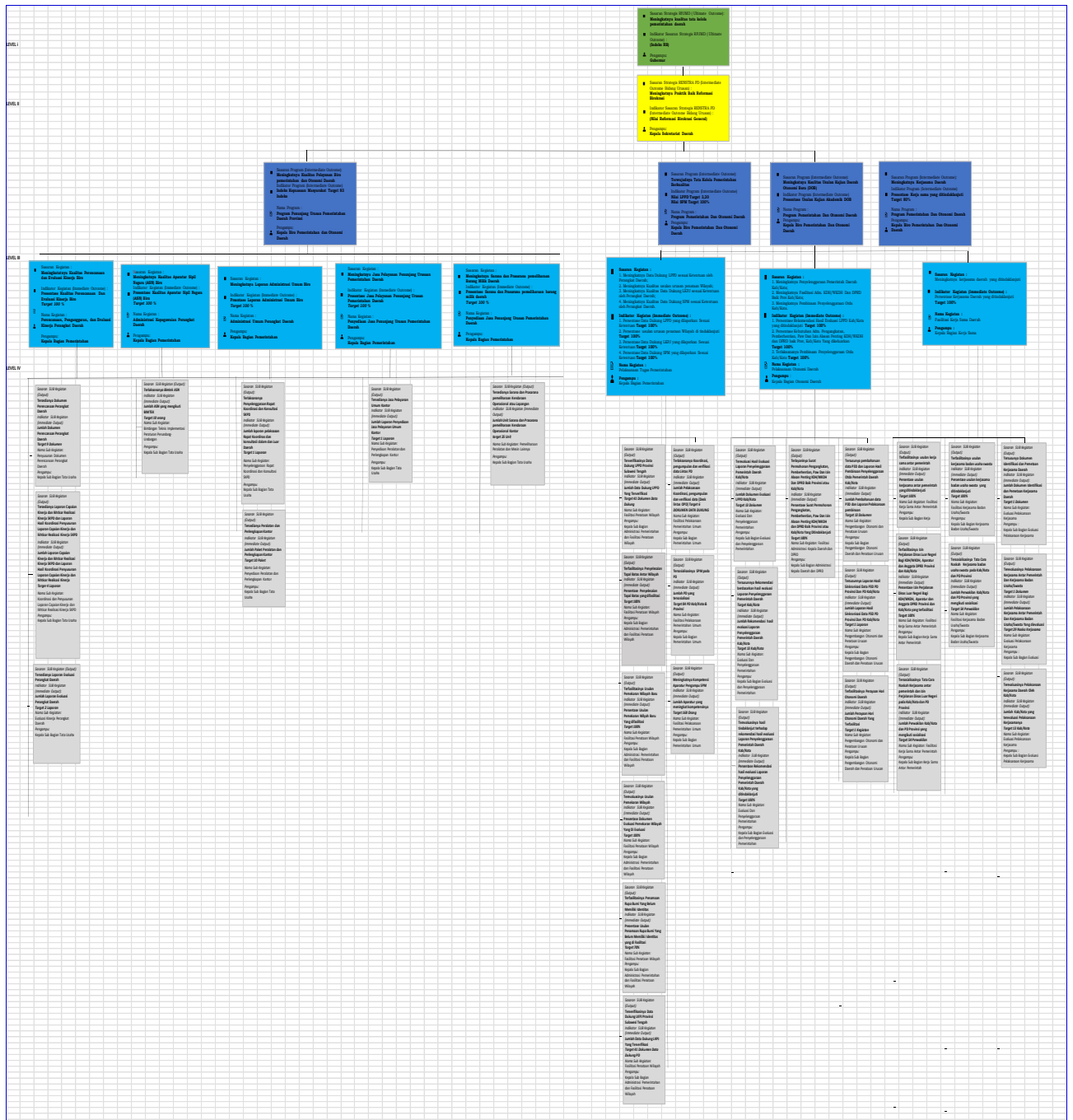
PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah upaya pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang telah dicapai. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Maka dasar pelaksanaan itu merupakan bagian dari Implementasi SAKIP guna mendukung terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*)

Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan Informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat
2. Mendukung Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kinerja biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tahun anggaran 2024 dapat dilihat dalam cascading sebagai berikut:

1.1 Cascading Kinerja



1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRATEGIS ORGANISASI

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah. Maka Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai dasar pembentukan dan susunan OPD Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dari Biro Administrasi Wilayah Daerah Pemerintahan berganti nama menjadi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah berkedudukan di bawah pembinaan dan koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh Kepala Biro.

Adapun Rincian Tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disebutkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 pasal 2 adalah sebagai berikut

TUGAS

Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama.

FUNGSI

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Biro dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian dan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pembinaan, perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, supervisi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha.

Fungsi:

- a. menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

**A. SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FASILITASI
PENATAAN WILAYAH**

Tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan perencanaan, pembinaan, pengoordinasian, supervisi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pembentukan, pemecahan, pengabungan dan penghapusan serta pemekaran wilayah, perubahan nama dan pemindahan ibukota;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai kodifikasi dan data wilayah administrasi pemerintah;
- c. menyiapkan bahan pemberian bimbingan, perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi wilayah pemerintahan, supervisi, pembinaan dan sosialisasi pemberian nama-nama geografis, batas wilayah, toponimi/rupa bumi;
- d. menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi kecamatan yang dilaksanakan kabupaten/kota;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar provinsi dan kabupaten/kota;
- f. menyiapkan bahan penyelesaian Aset Bekas Milik Asing;
- g. menyiapkan bahan analisis data tentang pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pemerintah mengenai tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- i. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (IPPD) perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota;
- j. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam Forum pelaksanaan penyusunan dan menyiapkan bahan pengembangan teknis administrasi pertanahan;
- k. melaksanakan menyiapkan bahan koordinasi, perencanaan, penetapan, penentuan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pertanahan;
- l. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sub bagian pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

C. SUB BAGIAN TATA USAHA

Tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan ANJAB, SOP, RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro pemerintahan dan otonomi daerah;
- g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
- h. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
- i. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

2. KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pembinaan, perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, supervisi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya

A. KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD

Tugas :

- a. Menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- c. Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan mengenai administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- d. Menyiapkan bahan analisis data administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi administrasi pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah;
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep rekomendasi izin ke luar negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan alasan penting;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi izin ke luar negeri bagi anggota/pimpinan DPRD dengan alasan penting;
- h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sub bagian administrasi kepala daerah dan DPRD; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

B. SUB BAGIAN PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH DAN PENATAAN URUSAN

Tugas:

- a. Menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan pengembangan dibidang pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan otonomi daerah;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan otonomi daerah;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis pemetaan urusan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan otonomi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sub bagian pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

C. SUB BAGIAN EVALUASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang evaluasi kinerja pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas daerah;
- b. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Menyiapkan bahan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- d. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Dan Peningkatan Kapasitas Daerah;
- e. Menyiapkan bahan pengolahan database Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah skala Daerah;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- g. Melakukan penetapan perencanaan pengembangan kapasitas Daerah;
- h. Menyiapkan bahan penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas Daerah;
- i. Menyiapkan bahan implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas Daerah;
- j. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas Kabupaten/Kota; dan
- k. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas daerah dalam rangka peningkatan daya saing.

3. BAGIAN KERJA SAMA

Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pembinaan, perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, supervisi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- d. penyiapan bahan supervisi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

A. SUB BAGIAN KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH

Tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan, mengoreksi bahan-bahan penyusunan draf kerjasama antar daerah;
- b. Menerima, menyusun, mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana program Kerjasama antar Daerah;
- c. melaksanakan, fasilitasi, sosialisasi, workshop, orientasi tugas dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan untuk forum kerjasama daerah;
- d. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama antar daerah;
- e. melaksanakan pembinaan dan sistem pengendalian intern;
- f. memfasilitasi penyusunan draf kerjasama Luar Negeri;

- g. mempersiapkan data potensi daerah dalam rangka Kerjasama Luar Negeri skala provinsi;
- h. menerima, menyusun, mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana program kerjasama Luar Negeri;
- i. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama luar negeri;
- j. mengelola administrasi ijin ASN Pemerintah Provinsi dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD ke Luar Negeri;
- k. mengkaji laporan perjalanan dinas luar negeri yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

B. SUB BAGIAN KERJA SAMA BADAN USAHA/SWASTA

Tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan dan mengoreksi bahan-bahan penyusunan draf kerjasama Badan Usaha / Swasta /pihak ketiga;
- b. menerima, menyusun, mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana program Kerjasama Badan Usaha / Swasta /pihak ketiga;
- c. melaksanakan, fasilitasi, sosialisasi, workshop, orientasi tugas dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan untuk forum kerjasama daerah;
- d. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama Badan Usaha/ Swasta /pihak ketiga;
- e. memfasilitasi kerjasama Pemerintah Provinsi dengan badan usaha;
- f. melakukan penyusunan data base kerjasama antara pemerintah daerah dengan Badan Usaha/Swasta/pihak ketiga;
- g. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama Badan Usaha/Swasta/pihak ketiga;
- h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sub bagian pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

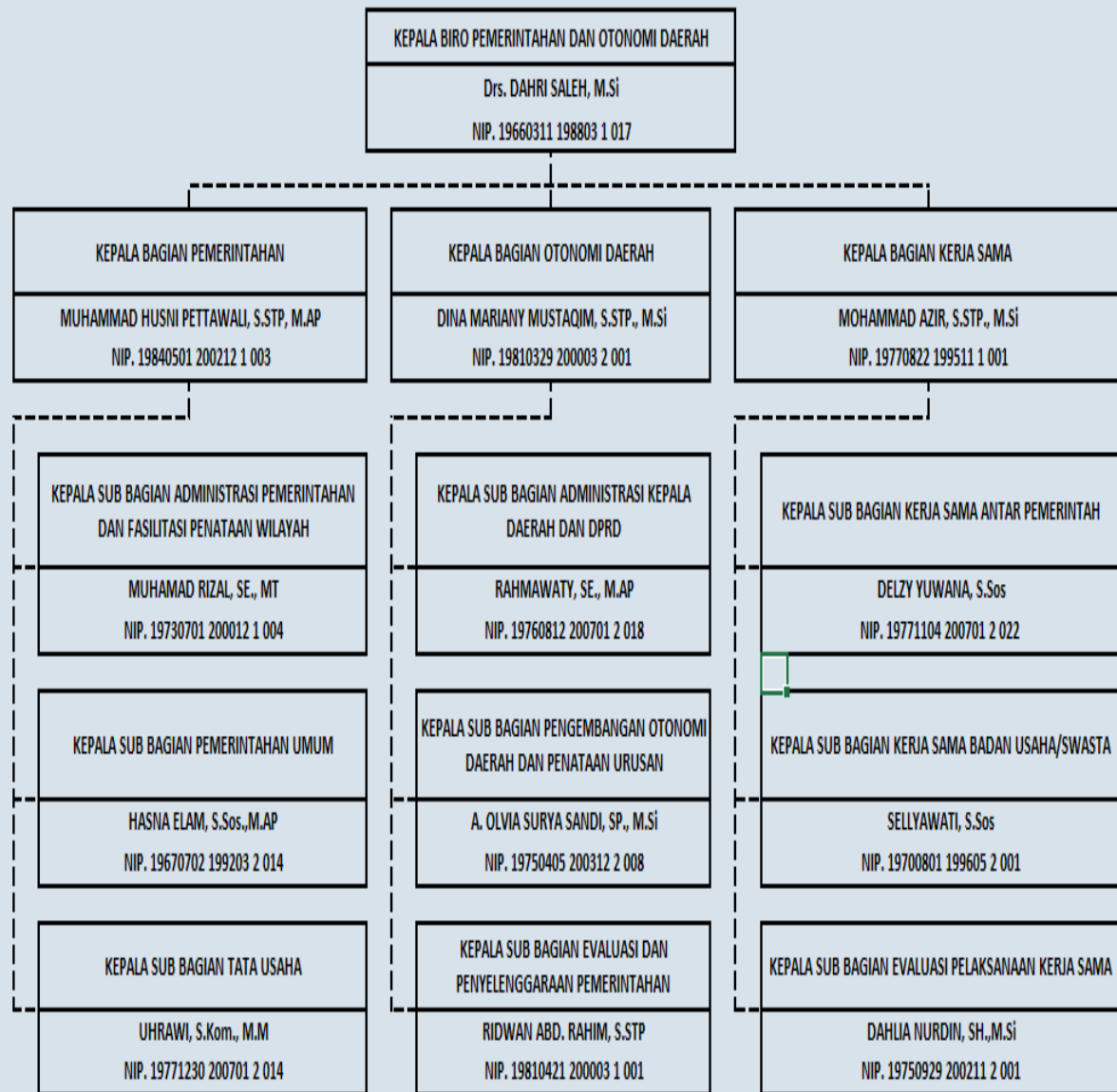
C. SUB BAGIAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA

Tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta;
- c. melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta;
- d. melaksanakan supervisi, sosialisasi, workshop pelaksanaan tugas evaluasi sub bagian evaluasi pelaksanaan kerjasama;
- e. melaksanakan pembinaan evaluasi penyelenggaraan kerjasama wajib kabupaten/kota;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sub bagian evaluasi pelaksanaan kerjasama;dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

SRUKTUR ORGANISASI

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH



1.3 ISU-ISU STRATEGIS

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat beberapa isu strategis yang dapat dijadikan sebagai focus perhatian dalam penetapan sasaran strategis yang diwujudkan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

- Belum adanya rencana aksi kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Sulawesi Tengah sehingga menyebabkan penyusunan anggaran tahunan untuk kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini tidak sesuai dengan RENSTRA.
- Dalam rangka Penataan Wilayah yang berbentuk Pemekaran Wilayah Kecamatan untuk tahun 2024 di beberapa Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kendala yaitu persyaratan teknis berupa belum adanya penegasan batas desa dan batas kelurahan.
- Terhambatnya proses PAW yang diberhentikan dari partai politiknya beserta gugatannya
- Validasi Data P3D 13 Kabupaten/Kota
- Kualitas Penyusunan Laporan LPPD

1.4 DUKUNGAN SDM DAN SARANA PRASARANA

1.4.1 DUKUNGAN SDM

Sumber Daya Manusia yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

A. Rekap Pegawai Per Jenis Kelamin

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
		PRIA	WANITA	
1	PNS	16	19	35
2	PPPK	4	7	11
	TOTAL	20	26	46

B. Rekap Pegawai Per Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

No	GOLRU	JABATAN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1.	II/b	1		1
2.	II/c	-	-	-
3.	II/d	1	-	1
4.	III/a	2	1	3
5.	III/b	-	2	2
6.	III/c	2	6	8
7.	III/d	6	3	9
8.	IV/a	1	6	7
9.	IV/b	2	1	3
10.	IV/c	1		1
	TOTAL	16	19	35

C. Rekap Pegawai Per Pendidikan Dan Jenis Kelamin

NO	PDDKN	JENIS KELAMIN				JMLH
		PRIA	%	WANITA	%	
1	SD					0
2	SMP					0
3	SMA/SMK	2		1		3
4	D.I					0
5	D.II					0
6	D.III			1		1
7	S1 / D.IV	7		7		14
8	S2	6		10		16
9	S3	1				1
TOTAL		16	0	19	0	35

D. Rekap Jabatan Struktural (Eselon)

NO	ESS	FORMASI	TERISI	LOWONG
1.	I.b			0
2.	II.a			0
3.	II.b	1	1	0
4.	III.a	3	3	0
5.	III.b			0
6.	IV.a	9	9	0
7.	IV.b			0
TOTAL		13	13	0

E. Pejabat Struktural Per Jenis Kelamin

NO	ESS	PRIA	WANITA	JUMLAH
1.	II.b	1		1
2.	II.c	-	-	-
3.	III.a	2	1	3
4.	III.b	-	-	-
5.	III.c			
6.	IV.a	2	7	9
TOTAL		5	8	13

F. Rekap Pendidikan Pejabat Struktural

NO	PDDKN	ESELON				JMLH
		I	II	III	IV	
1	SMA/SMK					0
2	D.I - D.III					0
3	S1 / D.IV				3	3
4	S2		1	3	6	10
5	S3					0
TOTAL		0	1	3	9	13

1.4.2 SARANA PRASARANA

Dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan, adanya sarana dan prasarana tentunya sangat membantu kelancaran serta efisiensi proses. Pada dasarnya fungsi dari sarana prasarana bergantung pada penggunaan dan bidangnya.

Artinya antara bidang yang satu dengan lainnya, akan membutuhkan sarana dan prasarana yang berbeda. Contoh kebutuhan sarana dan prasarana di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, tentunya berbeda dengan transportasi dan Kesehatan.

Secara Umum, Sarana dan Prasarana mempunyai empat fungsi utama, yakni :

1. Mempermudah proses pekerjaan
Sarana dan Prasarana berfungsi untuk mempermudah proses kegiatan, supaya tujuan bersama dapat tercapai
2. Mempercepat proses kerja
Selain mempermudah, adanya sarana dan prasarana juga mempercepat proses kerja suatu organisasi atau lembaga
3. Meningkatkan produktivitas
Produktivitas kegiatan karena terbantu oleh adanya sarana dan prasarana
4. Hasilnya lebih berkualitas oleh karena produktivitas meningkat, hasil kerja juga lebih berkualitas. Karena adanya sarana dan prasarana dapat mempermudah serta mempercepat proses kerja.

NO	NAMA BARANG/JENIS	MERK/TYPE	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	KENDARAAN RODA 4	innova, Rush	4	Unit	baik
2	KENDARAAN RODA 2	Honda, Suzuki, Yamha	22	Unit	baik
3	Komputer	Lenovo, Acer dan Apple	12	Unit	Baik
4	Laptop	Asus, Toshiba, Acer dan Lenovo	25	Unit	Baik
5	Note Book/Tablet	Apple dan Samsung	8	Unit	Baik
6	LCD/PROYECTOR	EPSON	2	Unit	baik
7	PINTER	EPSON	8	Unit	baik
8	AC	Gree, SHARP, Polytron	14	Unit	baik
9	Kamera	SONY dan NIKON	2	Unit	baik
10	TV LED	SHARP	1	Unit	baik
11	KULKAS	POLYTRON	2	Unit	baik
12	Brangkas	Tiger	2	Unit	baik

13	Kursi	CHITOSE, Ichiko, Indachi, Frontline	78	Unit	baik
14	Meja	kayu	60	Unit	baik
15	Scanner	EPSON	1	Unit	baik

1.5 Tindakan Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akip Tahun 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun Hasil Evaluasi Akuntabilitas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2024 Nomor : 700.1.2.1/112/LHP-AKIP/PROV/IRBAN3/2024 tanggal 24 Juni 2024 memperoleh nilai sebesar **73.8** sehingga mendapat predikat **BB (nilai>70-80)** dengan interpretasi **Sangat Baik**, maka dalam hal ini Laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dalam Format Tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024:

TINDAK LANJUT LHE AKIP INTERNAL BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

NO	REKOMENDASI LHE	TINDAK LANJUT
1	Membuat Dokumen atau Bagian Crosscutting Kinerja Internal yang Bersinggungan antara Sub Bidang satu dengan lainnya serta Bidang satu dengan Bidang Lainnya	Dalam Membuat Dokumen bagian crosscutting sudah dilakukan langkah-langkah termasuk identifikasi interaksi antara sub bidang seperti administrasi umum, keuangan, dan pengembangan SDM, serta hubungan antara bidang utama seperti kebijakan publik, pengawasan, dan Evaluasi Kinerja.
2	Indikator Kinerja harus Memenuhi Kriteria SMART	Kriteria SMART indikator kinerja Sudah di tuangkan ke dalam Arsitektur Kinerja, sehingga rencana tindak lanjut dapat disusun dengan fokus pada implementasi, pemantauan, dan evaluasi berkala, untuk mencapai tujuan yang lebih terukur dan efisien.
3	Melakukan Interview Internal Laporan Kinerja	Untuk kedepannya Pelaksanaan interview internal terkait laporan kinerja, di jadwalkan sesi interview untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pencapaian target kinerja, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan.
4	Melakukan Pengukuran Kinerja secara Berkala	Untuk kedepannya melakukan pengukuran kinerja secara berkala, menjadwalkan waktu dan frekuensi pengukuran, secara triwulanan, untuk memantau pencapaian target Kinerja.
5	Membuat Pedoman Tekhnis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (AKJ)	Akan Membuat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal (AKJ), dan Menyusun panduan yang jelas dan terstruktur untuk proses evaluasi.

Dokumen tersebut merupakan tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal Tahun 2024 oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Terdapat lima rekomendasi LHE beserta langkah-langkah tindak lanjut yang telah dirumuskan. Pertama, dalam menyusun dokumen bagian crosscutting kinerja internal, dilakukan identifikasi interaksi antar sub bidang dan antar bidang lainnya, mencakup kebijakan publik, pengawasan, dan evaluasi kinerja. Kedua, indikator kinerja telah dirancang agar memenuhi kriteria SMART, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan perencanaan implementasi, pemantauan, dan evaluasi berkala. Ketiga, pelaksanaan wawancara internal laporan kinerja dijadwalkan secara rutin untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap capaian kinerja, kendala, dan rekomendasi perbaikan. Keempat, pengukuran kinerja akan dilakukan secara berkala, dengan pengaturan frekuensi triwulanan untuk memantau kemajuan pencapaian target kinerja. Kelima, disusun pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal (AKI) yang sistematis dan terstruktur, untuk mendukung proses evaluasi secara menyeluruh dan konsisten.

Maka terlaksananya Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal Tahun 2024 ialah :

- 1. Membuat Dokumen atau Bagian Crosscutting Kinerja Internal yang Bersinggungan antara Sub Bidang satu dengan lainnya serta Bidang satu dengan Bidang Lainnya**
- 2. Melakukan Pengukuran Kinerja secara Berkala**
- 3. Membuat Pedoman Tekhnis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (AKI)**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja yang akan dicapai pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mencakup visi, misi prioritas daerah, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini.

VISI Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 berdasarkan RPJMD adalah:

”GERAK CEPAT MENUJU SULAWESI TENGAH LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH MAJU”.

1. **Gerak Cepat** dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara cepat melebihi tindakan normal, termasuk cepat dalam bertindak untuk menyelesaikan berbagai masalah, serta cepat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk kemudian memberikan solusi yang tepat
2. **Lebih Sejahtera** Dapat dimaknai sebagai gambaran kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang terbebas dari ancaman dan tekanan fisik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik pangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh akses pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas dan adil bagi seluruh masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan penghasilan yang lebih memadai.
3. **Lebih Sejahtera** juga dapat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang memiliki akses yang lebih luas dan lebih merata dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi, sosial serta terciptanya rasa aman dari berbagai ancaman.
4. **Lebih Maju** Gambaran dari kondisi suatu masyarakat yang lebih dinamis dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, kearah yang lebih baik melalui berbagai inovasi yang terintegrasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Lebih Maju dapat pula merupakan suatu kondisi kehidupan komunitas masyarakat yang jauh lebih baik secara ekonomi, sosial maupun budaya sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

MISI Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum, dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Hak Azasi Manusia (HAM);
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;
6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, Antar Sesama Manusia sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan;
7. Melakukan Sinergitas Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi Bertetangga;
8. Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi dan dijalankan secara Sistematis dan Digital; dan
9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.

Guna mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Sekretariat Daerah memandang perlu untuk melakukan perubahan internal. Rumusan perubahan internal dimaksud adalah sebagai berikut:

- Perlunya diadakan evaluasi kinerja aparat pada setiap Biro;
- Perlunya diadakan analisis kompetensi jabatan struktural yang terstandar dan terbuka;
- Peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan karakter, kecakapan dan ketrampilan;

- Perlunya diterapkan konsep reward dan punishment berdasarkan kinerja;
- Perlunya optimalisasi penerapan sistem informasi manajemen di setiap biro, untuk efisiensi dan efektivitas.

2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode 1 - 5 tahun mendatang, agar diketahui apa yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan misi (2), misi (7), dan misi (9) yang telah ditetapkan, maka diurai misi dengan pernyataan tujuan dan indikator tujuannya. Maka Penjabaran Misi dapat dilihat pada tabel berikut :

MIS I	TUJUAN	INDIKATOR
1	2	3
Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good Governance and Clean Government</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi
Melakukan sinergitas Kerjasama pembangunan antar daerah bertetangga sekawasan maupun di dalam provinsi Sulteng dan di luar provinsi bertetangga	Mewujudkan Kolaborasi Antara Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Dan Pihak Lainnya Dalam Pembangunan Secara Bersinergi Dan Terintegrasi	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Daerah
Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah	Mewujudkan Persiapan Pembentukan Daerah Otonomi Baru	Persentase Kajian Akademik Persiapan Dob Yang Disampaikan Ke Kemendagri RI

Sasaran yang akan dicapai oleh Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026 berdasarkan rumusan Misi (2), Misi (7), dan Misi (9) adalah sebagai berikut :

Misi 2 (Kedua) : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM, dengan tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government), dan dengan sasaran pembangunan

- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, Dan Transparan)

Misi 7 (Ketujuh) : Melakukan sinergitas Kerjasama pembangunan antar daerah bertetangga sekawasan maupun di dalam provinsi Sulteng dan diluar provinsi bertetangga

- Meningkatnya Kerja Sama Antar Daerah

Misi 9 (Kesembilan) : Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah

- Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah, disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun

2.2 STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran dapat tercapai. Strategi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan sebagai upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran

kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Dalam rangka efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pokok urusan pemerintahan daerah Urusan Penunjang mempedoman dokumen perencanaan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
2. Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
3. Perjanjian Kinerja (PK) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama antar daerah.	Melaksanakan Pengembangan Otonomi Daerah;
		Melaksanakan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan; Kerjasama antar daerah
		Melaksanakan Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.
	Meningkatkan Pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama antar daerah.	Melaksanakan Pengembangan Otonomi Daerah;
		Melaksanakan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan; Kerjasama antar daerah
		Melaksanakan Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

2.3 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Perencanaan program dan kegiatan dibuat berdasarkan pada isu strategis bidang pemerintahan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Tengah menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka memberikan dukungan atas Misi kedua, ketujuh dan kesembilan RPJMD 2021 - 2026

Tingkat Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023-2024. Renstra merupakan suatu proses yang menyajikan rencana-rencana strategis organisasi dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis ini sebagai implementasi RPJMD di tingkat Organisasi Perangkat Daerah. Isu-isu strategis di tingkat SKPD dianalisis untuk menemukan strategi yang efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Pada tahap akhir, pencapaian sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) oleh pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Secara keseluruhan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 telah mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026. Renstra Biro Pemerintahan telah mengakomodir keseluruhan program prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMD tahun 2021-2026, Adapun Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Melaksanakan 2 (dua) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 16 (tujuh belas) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp 5.852.500.000** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2.3.1

Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Teknis

Terkait Langsung Pencapaian Sasaran 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang	
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	1.997.983.536	3.343.051.536	1.345.068.000	Bertambah
		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	245.131.266	762.631.266	517.500.000	Bertambah
	Meningkatnya Kualitas Usulan Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB)	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	130.000.000	317.500.000	187.500.000	Bertambah
		Fasilitasi Penataan Wilayah	115.131.266	445.131.266	330.000.000	Bertambah
		Pelaksanaan Otonomi Daerah	534.923.000	1.062.491.000	527.568.000	Bertambah
		Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	145.298.000	345.298.000	200.000.000	Bertambah
	Meningkatnya Kualitas Capaian SPM	Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	224.630.000	224.630.000	-	Bertambah
		Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	164.995.000	492.563.000	327.568.000	Bertambah
	Meningkatnya Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.217.929.270	1.517.929.270	300.000.000	Bertambah
		Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	845.000.000	1.075.503.000	230.503.000	Bertambah
		Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	150.030.000	150.030.000	-	-
		Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	222.899.270	292.396.270	69.497.000	Bertambah

Tabel. 2.3.2

Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Pendukung Pencapaian Sasaran 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.417.016.464	2.509.448.464	92.432.000	Bertambah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.366.060	51.422.010	- 2.944.050	Berkurang
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.705.380	28.705.380	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.249.800	14.239.800	- 3.010.000	Berkurang
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.410.880	8.476.830	65.950	Bertambah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.220.000	48.050.000	38.830.000	Bertambah
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.220.000	48.050.000	38.830.000	Bertambah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.242.602.554	1.319.023.604	76.421.050	Bertambah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	851.358.604	873.790.604	22.432.000	Bertambah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	391.243.950	445.233.000	53.989.050	Bertambah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	817.267.850	798.597.850	- 18.670.000	Berkurang
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	817.267.850	798.597.850	- 18.670.000	Berkurang
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	293.560.000	292.355.000	- 1.205.000	Berkurang
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	293.560.000	292.355.000	- 1.205.000	Berkurang

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah "Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, dan Kerjasama." yang merupakan tugas dan fungsi utama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pembinaan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama. Maka Indikator kinerja ditetapkan untuk melihat capaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan utama yang ditetapkan dalam Renstra Setda. Indikator kinerja utama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang disajikan pada Tabel 2.4.1 di bawah ini :

INDIKATOR KINERJA UTAMA							
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			TARGET TAHUN 2025
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	INDEKS	88,50	89,00	101%	90
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	Nilai Kinerja LPPD Provinsi	NILAI	3,1670	0	0%	3,2500
		Persentase Data Capaian SPM	%	90,65	91	100%	90,68
3	Meningkatnya Kualitas Usulan Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB)	Persentase Usulan Kajian Akademik DOB	%	100	100	100%	100
4	Meningkatnya Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	%	100	100	100%	100

Persentase kajian akademik dan ada beberapa faktor terjadinya pemekaran wilayah antara lain kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas wilayah, pertahanan dan keamanan.

2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi kinerja aparatur. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah membuat PK sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi, Renstra 2021- 2026, ketersediaan anggaran sebagaimana yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)TA 2024, serta mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disusun berdasarkan target dan kinerja yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk rumusan Perjanjian Kinerja (PK) setingkat Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Eselon II) disajikan pada Tabel Lampiran Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, sebagai berikut.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Drs. DAHRI SALEH, M.Si**
Jabatan : **Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dra. NOVALINA, MM**
Jabatan : **Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan mencapai target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian Dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pahu, 41 NOVEMBER 2024

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Dra. NOVALINA, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19690927 198811 2 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. DAHRI SALEH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19660311 198803 1 017

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	- INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	83
2	TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERKUALITAS	- NILAI LPPD - MENINGKATNYA KUALITAS CAPAIAN SPM	3,20 100 %
3	MENINGKATNYA KERJA SAMA DAERAH	- PRESENTASE KERJA SAMA YANG DITINDAKLANJUTI	80 %
4	MENINGKATNYA KUALITAS USULAN KAJIAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB)	- PRESENTASE USULAN KAJIAN AKADEMIK DOB	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	Rp. 2.509.448.464	APBD P
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Rp. 3.343.051.536	APBD P
JUMLAH		Rp. 5.852.500.000	

Palu, 11 NOVEMBER 2024

PIHAK KEDUA
 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
 SULAWESI TENGAH


Drs. NOVALINA, MM
 Pembina Utama Madya
 Nip. 19690927 198811 2 001

PIHAK PERTAMA
 KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN
 OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT
 DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. DAHRI SALEH, M.Si
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19660311 198803 1 017

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan elemen krusial dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip perencanaan yang terukur, monitoring dan evaluasi yang sistematis, serta keterbukaan informasi, instansi pemerintah dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kepercayaan publik. Melalui pendekatan yang holistik dan perbaikan berkelanjutan, tantangan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja dapat diatasi, sehingga pada akhirnya tercipta pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas,

Maka perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui perbandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang disampaikan dengan akhir tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 serta menggali informasi terkait upaya apa yang sudah dilakukan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan, termasuk kendala yang dihadapi dan strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan melalui inovasi. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Tengah dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dipakai dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Baik
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No 86 Tahun 2017

Pada Pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024 berdasarkan capaian kinerja sesuai dengan yang telah direncanakan. Pencapaian target dari suatu kegiatan merupakan tolok ukur keberhasilan sebuah perencanaan yang baik, karena suatu proses tanpa adanya sebuah target bagaikan berjalan tanpa arah. Maka dari itu sebelum pelaksanaan suatu kegiatan harus ditentukan dahulu target yang akan dicapai

TABEL. 3.1
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			TARGET TAHUN 2025
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	INDEKS	88,50	89,00	101%	90
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	Nilai Kinerja LPPD Provinsi	NILAI	3,1670	0	0%	3,2500
		Persentase Data Capaian SPM	%	90,65	91	100%	90,68
3	Meningkatnya Kaulitas Usulan Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB)	Presentase Usulan Kajian Akademik DOB	%	100	100	100%	100
4	Meningkatnya Kerjasama Daerah	Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	%	100	100	100%	100

Dalam mendukung capaian kinerja Provinsi Sulawesi Tengah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki 4 (lima) Sasaran program dan 5 (lima) Indikator kinerja program Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024

Tabel ini menunjukkan beberapa sasaran dan indikator kinerja yang ditargetkan untuk tahun 2025, beserta capaian yang sudah diraih tahun 2024. Berikut adalah analisis perbandingan untuk masing-masing sasaran tersebut.

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat

Target : 88,50

Realisasi : 89,00

Capaian % : 101%

Target Tahun 2025 : 90

Capaian di atas target menunjukkan pelayanan telah meningkat dan memuaskan masyarakat.

2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas

Indikator Kinerja : Nilai Kinerja LPPD Provinsi

Target : 3,167

Realisasi : 0

Capaian % : 0%

Target Tahun 2025 : 3,250

Capaian di bawah target menunjukkan perlu perhatian lebih untuk peningkatan tata kelola.

3. Meningkatkan Kualitas Usulan Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB)

Indikator Kinerja : Presentase Usulan Kajian Akademik DOB

Target : 100%

Realisasi : 91%

Capaian % : 100%

Target Tahun 2025 : 90%

Capaian di atas target menunjukkan kualifikasi usulan yang cukup baik, meskipun ada sedikit penurunan pada target tahun 2025.

4. Meningkatkan Kerjasama Daerah

Indikator Kinerja: Presentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti

Target : 100%

Realisasi : 100%

Capaian % : 100%

Target Tahun 2025 : 100%

Capaian ini menunjukkan bahwa semua kerjasama yang ditargetkan berhasil ditindaklanjuti.

Kesimpulan Umum

Capaian Positif : Indeks Kepuasan Masyarakat dan Kerjasama Daerah menunjukkan hasil yang baik, melebihi atau pada target yang ditentukan.

Perlu Perhatian : Nilai Kinerja LPPD Provinsi membutuhkan perhatian mendalam untuk mencapai target ke depan.

Target Realistis : Beberapa target di tahun 2025 cenderung lebih realistis berdasarkan capaian saat ini.

A. PERBANDINGAN ANTAR TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,50	89,00	101%	Sangat Baik
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	Nilai Kinerja LPPD Provinsi	3,1670	0	0%	Masih Menunggu Nilai/Status Kemendagri
		Persentase Data Capaian SPM	90,65	91	100%	Sangat Baik
3	Meningkatnya Kaulitas Usulan Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB)	Presentase Usulan Kajian Akademik DOB	100	100	100%	Sangat Baik
4	Meningkatnya Kerjasama Daerah	Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	100	100	100%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, indikator kinerja utama yang telah dijanjikan pada tahun 2024, beberapa indikator kinerja program pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah terealisasi “Sangat Baik” namun Nilai LPPD Provinsi menunggu hasil keputusan evaluasi MENDAGRI tentang nilai LPPD. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ayat (1) dan ayat (21) yang menerangkan bahwadisampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan dilaksanakan melalui sistem informasi elektronik secara Via Daring. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan telah di serahkan pada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemda dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 tahun anggaran.

**B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA
TAHUNINI DENGAN TAHUN LALU DAN TAHUN TERAKHIR**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	88,56	114%	80	88,56	111%	88,50	89,00	101%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	Nilai Kinerja LPPD Provinsi	3,1145	0	0%	3,1300	3,1145	100%	3,1670	0	0%
		Persentase Data Capaian SPM	90,63	54,3	60%	90,63	90,52	100%	90,65	91	100%
3	Meningkatnya Kaulitas Usulan Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB)	Presentase Usulan Kajian Akademik DOB	100	0	0%	100	100	100%	100	100	100%
4	Meningkatnya Kerjasama Daerah	Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%

Tabel di atas menunjukkan target, realisasi, dan capaian dari beberapa indikator kinerja untuk pelayanan biro pemerintahan dan otonomi daerah. Berikut adalah penjelasan detail berdasarkan kolom dan indikator yang ada.

1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah

- Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat
- Target Tahun 2022: 78
- Realisasi Tahun 2022: 88,56
- Capaian Tahun 2022: 114% (melebihi target)

2 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkelanjutan

- Indikator Kinerja: Nilai Kinerja LPPD Provinsi
- Target Tahun 2022: 3,1145
- Realisasi Tahun 2022: 0 (belum ada realisasi)

- Target Tahun 2023: 3,1300
- Capaian Tahun 2023: 100%
- Target Tahun 2024: 3,1670
- Realisasi Tahun 2024: 0 (belum ada realisasi)

3 Meningkatkan Kualitas Usulan Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB)

- Indikator Kinerja: Persentase Data Capaian SPM
- Target Tahun 2022: 90,63
- Realisasi Tahun 2022: 54,3
- Capaian Tahun 2022: 60% (belum mencapai target)
- Target Tahun 2023: 90,52
- Realisasi Tahun 2023: 100%
- Capaian Tahun 2023: 100% (mencapai target)

4 Meningkatkan Kinerja Daerah

- Indikator Kinerja: Persentase Kinerja yang ditindaklanjuti
- Target Tahun 2022: 100
- Realisasi Tahun 2022: 100
- Capaian Tahun 2022: 100% (mencapai target)

Kesimpulan

- **Kinerja Tercapai:** Meningkatnya Capaian Realisasi Kinerja tiap tahunnya telah tercapai sesuai Target Kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang.
- **Kinerja Baik:** Terdapat indikator yang berhasil mencapai atau melebihi target, seperti Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase Usulan Kajian Akademik DOB pada tahun 2023.
- **Kinerja Menurut:** Beberapa indikator seperti Nilai Kinerja LPPD Provinsi memerlukan perhatian lebih karena tidak ada realisasi.
- **Perbaikan Diperlukan:** Indikator Persentase Data Capaian SPM pada tahun 2022 menunjukkan kurangnya pencapaian yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Tabel ini memberi gambaran yang jelas tentang efektivitas dan efisiensi dari kinerja pemerintah dalam mengelola otonomi daerah.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH DI RENSTRA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TAHUN AKHIR RENSTRA 2026	TAHUN KEMAJUAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,00	92	97%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	Nilai Kinerja LPPD Provinsi	0	3,3531	0%
		Persentase Data Capaian SPM	91	100	91%
3	Meningkatnya Kaulitas Usulan Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB)	Presentase Usulan Kajian Akademik DOB	100	100	100%
4	Meningkatnya Kerjasama Daerah	Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	100	100	100%

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

- Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat
- Capaian 2024: 89,00
- Target Tahun Akhir Renstra 2026: 92
- Tahun Kemajuan: 97%

2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas

- Indikator Kinerja: Nilai Kinerja LPPD Provinsi
- Capaian 2024: 0
- Target Tahun Akhir Renstra 2026: 3,3531
- Tahun Kemajuan: 0%

3. Meningkatnya Kualitas Usulan Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB)

- Indikator Kinerja: Persentase Data Capai SPM
- Capaian 2024: 91
- Target Tahun Akhir Renstra 2026: 100
- Tahun Kemajuan: 91%

4. Meningkatnya Kerjasama Daerah

- Indikator Kinerja: Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti
- Capaian 2024: 100
- Target Tahun Akhir Renstra 2026: 100
- Tahun Kemajuan: 100%

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN RENSTRA

- Sasaran 1: Mencapai hampir target dengan progres yang baik (97%).
- Sasaran 2: Tidak ada pencapaian (0%), perlu perhatian lebih untuk meningkatkan kinerja.
- Sasaran 3: Menunjukkan hasil yang lebih baik tetapi masih di bawah target (91%).
- Sasaran 4: Sudah mencapai target yang diharapkan (100%).

Ada pencapaian yang baik di beberapa sasaran, namun ada juga yang membutuhkan perhatian khusus untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sulteng memiliki Program dan Kegiatan yang berkaitan Program dan Kegiatan Nasional Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kemudian pada penilaian LPPD Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tengah masih menunggu hasil dari Kementrian dalam Negeri tentang hasil Skor Kinerja yang di berikan pada penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2024.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan menuju good governance dan clear government serta bercita-cita memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat di berbagai sektor dengan prinsip efektif dan efisien sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. terakhir, Gubernur Sulawesi Tengah menekankan agar perangkat daerah serius melakukan perbaikan dengan memperhatikan validitas dan akuntabilitas data agar masyarakat bisa merasakan hasil kinerja pemerintah daerah guna mewujudkan Sulawesi Tengah yang lebih Sejahtera dan Maju.

Sementara, Plh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kementerian Dalam Negeri “Imelda” menuturkan LPPD merupakan laporan wajib yang setiap tahunnya harus diserahkan oleh seluruh kepala daerah dan hasil EPPD Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang 3 tahun terakhir mengalami kenaikan dari peringkat ke 29 mencapai peringkat ke 15 secara Nasional.

Sedangkan di Provinsi Sulawesi Selatan meraih peringkat Ke – 3 LPPD 2023 atas penilaian LPPD 2022. Dua Tahun Berturut turut Makassar Kembali masuk dalam kategori 10 besar Penilaian LPPD.

Tabel Berikut menjelaskan Skor Kinerja LPPD Nasional:

Permendaqri Nomor 18 Tahun 2020

No	Skor Kinerja	Status Kinerja
1	1.00 – 1.80	Sangat Rendah
2	1.81 – 2.60	Rendah
3	2.61 – 3.40	Sedang
4	3.41 – 4.20	Tinggi
5	4.21 – 5.00	Sangat Tinggi

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN /KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Tujuan dan sasaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sulteng dalam meningkatkan kinerja di Tahun 2024 hampir mencapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan di tahun pertama Renstra. Berikut adalah pendekatan sistematis untuk menganalisis faktor-faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta peningkatan atau penurunan kinerja, yang mempengaruhi kinerja :

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,50	89,00	101%	Dokumen Administrasi Pelayanan Urusan Pemerintahan disusun tepat waktu
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	Nilai Kinerja LPPD Provinsi	3,1670	0	0%	Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan masih menunggu hasil Nilai Keputusan KEMENDAGRI
		Persentase Data Capaian SPM	100%	91%	110%	Persentase Standar Pelayanan Minimal telah berdasarkan waktu inputan
3	Meningkatnya Kaulitas Usulan Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB)	Presentase Usulan Kajian Akademik DOB	100%	100%	100%	Persentase Penyampaian 2 Daerah Pemekaran telah sampai pada Pemerintah Pusat, masih menunggu hasil usulan kajian DOB
4	Meningkatnya Kerjasama Daerah	Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Naska Kerjasama telah ditindak lanjuti

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa, keberhasilan kinerja masing-masing indicator pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2024 didukung oleh terlaksananya kegiatan pada tiap tiap indikator kinerja antara lain Naska yang telah ditindaklanjuti, tersusunnya Dokumen LPPD dan SPM, serta Dokumen Administrasi Pelayanan Urusan Pemerintahan yang tepat waktu.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,50	89,00	101%	Rp 1.593.418.000	Rp 1.585.351.174	101%	2,01
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	Nilai Kinerja LPPD Provinsi	3,1670	0	0%	Rp 317.500.000	Rp 315.837.419	101%	1,01
		Persentase Data Capaian SPM	90,65	91	100%	Rp 445.131.266	Rp 439.454.430	101%	2,02
3	Meningkatnya Kaulitas Usulan Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB)	Presentase Usulan Kajian Akademik DOB	100	100	100%	Rp 317.500.000	Rp 315.837.419	101%	2,01
4	Meningkatnya Kerjasama Daerah	Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	100	100	100%	Rp 1.077.929.270	Rp 1.046.028.881	103%	2,03

Berdasarkan table diatas disimpulkan bahwa pagu anggaran berapa Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp 5.852.500.000,- realisasi anggaran atas pencapaian 5 (empat) Sasaran indikator program pada tahun 2024 sebesar Rp 5.770.445.516,- (98,60%). Terdapat efesiensi anggaran sebesar 9,07%.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		KETERANGAN
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100%	Rp 2.509.448.464	98,60%	Rp 2.500.287.634	99%	100%	MENUNJANG
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	Nilai Kinerja LPPD Provinsi	%	100%	Rp 2.903.051.536	97,49%	Rp 2.830.157.882	99%	100%	MENUNJANG
			Persentase Data Capaian SPM								
		Meningkatnya Kaulitas Usulan Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB)	Presentase Usulan Kajian Akademik DOB								
		Meningkatnya Kerjasama Daerah	Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti								

Berdasarkan table diatas, capaian indikator kinerja sasaran didukung oleh 2 (dua) program dengan 5 (Lima) indikator kinerja program, dengan hasil kegiatan antara lain :

- Indikator program Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti. Untuk kerja sama dalam negeri diukur dari persentase kesepakatan Bersama yang telah disusun Perjanjian Kerjasamanya, maka pelaksanaan kerja sama dapat berjalan dengan efektif.

Indikator program tersebut tercapai melalui Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah didukung oleh Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Badan Usaha Swasta dan Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama.

Fasilitasi dan Monitoring Pengembangan Kerjasama Daerah Dalam Negeri yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 antara lain :

Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat
Kabupaten : Sigi, Donggala, Parigi Mautong, Poso, Tojo Una Una, Buol, Banggai, Banggai kepulauan, Banggai Laut
Kota : Palu

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menjalin Perjanjian Kerjasama tentang pembangunan, penempatan dan pengembangan transmigrasi di provinsi sulawesi Tengah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama 5 (lima) Tahun .

Kemudian Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Dan Pelayanan Publik selama 5 (lima) Tahun

- b. Pada pelaksanaan Sosialisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 yang ikuti OPD Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menargetkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2025 masuk 5 besar secara Nasional.



Saat menghadiri kegiatan optimalisasi dan tata kelola Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Tengah yang diinisiasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah di ruang Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Selasa (11/06/2024).



Pada pelaksanaan Sosialisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 yang diikuti OPD Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Tengah.



Telah disusun dan disampaikan kepada Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri pada Triwulan 1 tahun 2024, sedangkan ringkasan LPPD Tahun 2022 telah disampaikan kepada Masyarakat.

- c. Pada peningkatan Capaian SPM di buatlah Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penyusunan dan Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2024. Untuk meningkatkan Indikator Persentase Capaian SPM Provinsi Sulawesi Tengah. Maka pelaksanaan tersebut di Bimbing oleh Pemateri dari Kementerian Dalam negeri.



- d. Adapun peningkatan pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melaksanakan tugas oleh Kepala Daerah dalam menjalankan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas dalam meningkatkan Pelayanan Kepuasan Masyarakat pada Rapat Rapat yang berikan tanggjawab.



- e. Dalam penanganan bidang Administrasi Penataan Wilayah dan Pemerintahan Umum yang di tindak lanjuti adalah bagian dari penanganan Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai berikut :

Hal ini ditunjang Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah serta Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum.

Pada tahun 2024 di adakan Kegiatan Pendatangan Berita Acara Kesepakatan Tapal Batas Gerbang Bersama Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso yang di hadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah.



3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja menginformasikan seberapa besar dampak dan hasil dari program dan kegiatan yang dibiayai dari anggaran APBD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 yang memaparkan Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Bidang Keuangan yang membandingkan antara Anggaran Dan Realisasi Dari Pencapaian Program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang menggambarkan Akuntabilitas Keuangan yang dikelola oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut.

TABEL REALISASI ANGGARAN

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
- Jumlah dokumen perancangan perangkat daerah	28.705.380,00	28.705.250,00	130,00
- jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14.239.800,00	14.099.800,00	140.000,00
- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.476.830,00	8.476.650,00	180,00
- Jumlah yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	48.050.000,00	47.332.000,00	718.000,00
- Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	873.790.604,00	872.574.490,00	1.216.114,00
- Jumlah Laporan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	0	0	0
- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	445.233.000,00	443.183.294,00	2.052.706,00

- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	798.597.850,00	796.967.850,00	1.630.000,00
- Jumlah Laporan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	292.355.000,00	288.951.300,00	3.403.700,00
- Jumlah Dokumen Pengelola Administrasi Pemerintahan Dan Fasilitas Penataan Wilayah	317.500.000,00	315.837.419,00	1.662.581,00
- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemerintahan Umum	445.131.266,00	439.454.430,00	5.676.836,00
- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	345.298.000,00	334.085.472,00	11.212.528,00
- Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang dilaksanakan	224.630.000,00	222.204.235,00	2.425.765,00
- Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggara Pemerintahan	492.563.000,00	472.547.445,00	20.015.555,00
- Jumlah Kerja Sama antar Pemerintah yang Difasilitasi	1.075.503.000,00	1.045.422.626,00	30.080.374,00
- Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	150.030.000,00	149.769.721,00	260.279,00
- Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	292.396.270,00	290.836.534,00	1.559.736,00

Keterangan Tabel:

- Pencapaian Kinerja : Realisasi Indikator / Target X 100%
- Penyerapan Anggaran : Realisasi Keuangan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang mendukung indikator

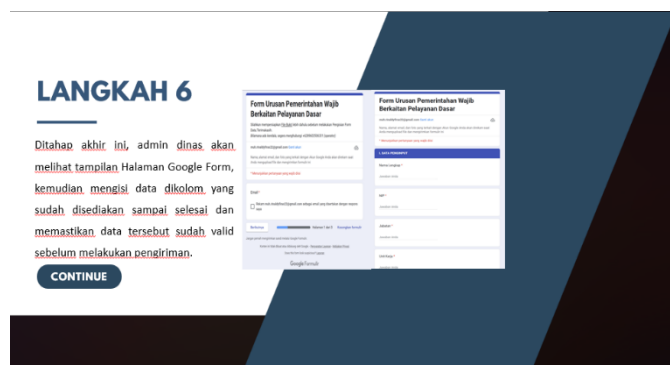
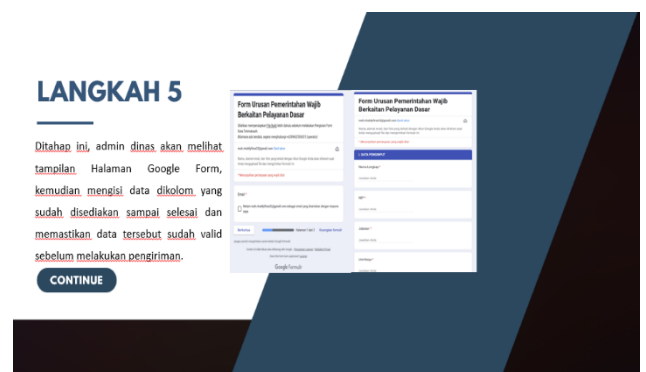
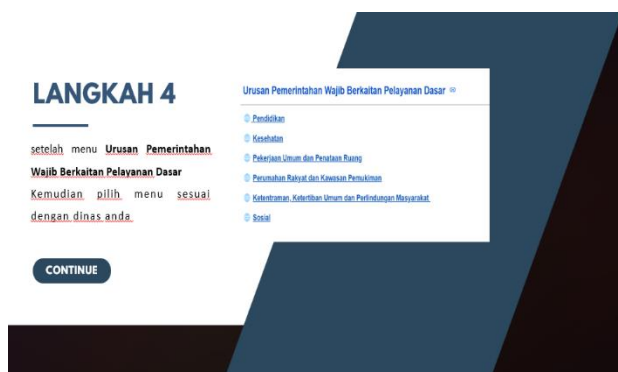
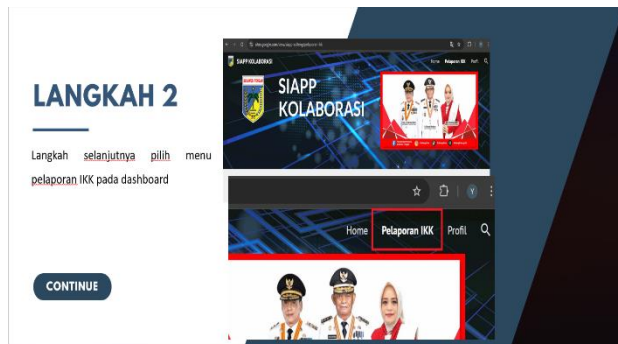
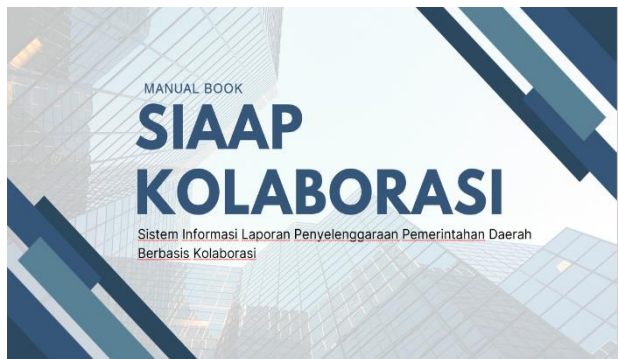
Berdasarkan uraian tabel diatas terlihat bahwa capaian target realisasi anggaran berada rata-rata nilai 98,60%.

3.3 INOVASI

Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Kolaborasi Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebuah platform atau sistem yang dirancang untuk membantu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola, menyusun dan melaporkan kinerja pemerintahan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sistem ini juga bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam integrasi data melalui sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (SILPPD) Kementerian Dalam Negeri. Sistem ini dikelola oleh Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan dukungan dari instansi terkait lainnya:

Tabel Daftar Inovasi 2024 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	NAMA INOVASI	URAIAN INOVASI	DAMPAK INOVASI
1.	SISTEM INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (SIAPP KOLABORASI)	Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Kolaborasi Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebuah platform atau sistem yang dirancang untuk membantu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola, menyusun dan melaporkan kinerja pemerintahan sesuai dengan regulasi yang berlaku	Dengan adanya sistem informasi ini semoga dapat bermanfaat serta membantu Pemerintah dalam mengelola, menyusun dan melaporkan kinerja pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tengah



3.4 PENGHARGAAN

Pada tahun 2024 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum mendapatkan Penghargaan di Tahun 2024.

BAB IV

PENUTUP

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyadari di balik berbagai upaya yang dilakukan, banyak tantangan yang masih dihadapi untuk benar benar memenuhi seluruh ekspektasi tentang pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai evaluator mulai dari proses perencanaan sampai kepada proses pelaporan kinerja, yang bertujuan meningkatkan nilai komponen evaluasi kinerja internal

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Laporan Kinerja dari 2 (dua) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar

Rp 5.852.500.000 adalah sebagai tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,50	89,00	101%	Rp 1.593.418.000	Rp 1.585.351.174	99%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	Nilai Kinerja LPPD Provinsi	3,1670	0	0%	Rp 317.500.000	Rp 315.837.419	99%
		Persentase Data Capaian SPM	90,65	91	100%	Rp 445.131.266	Rp 439.454.430	99%
3	Meningkatnya Kaulitas Usulan Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB)	Presentase Usulan Kajian Akademik DOB	100	100	100%	Rp 317.500.000	Rp 315.837.419	99%
4	Meningkatnya Kerjasama Daerah	Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	100	100	100%	Rp 1.077.929.270	Rp 1.046.028.881	97%

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan pada capaian kinerja tahun 2024 pada sasaran yang sesuai dengan ”Meningkatnya Kerjasama Daerah” dengan indikator kinerja “Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti” pencapaian sasaran ini sudah dapat di penuhi dengan tingkat capaian kinerja 100%.
2. Indikator Kinerja Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah bahwa perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Tahun 2024 ini bahwa target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap rencana strategis Biro Pemerintahan

dan Otonomi Daerah tercapai target RENSTRA yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja sesuai dengan target RENSTRA.

3. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sepanjang tahun 2024 telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian sangat baik yang terlihat dari rata-rata capaian serapan anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebesar 98,60% dan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% .
4. Capaian realisasi anggaran berada diatas rata-rata nilai 97% sampai dengan 99%
5. Inovasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Kolaborasi Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebuah platform atau sistem yang dirancang untuk membantu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola, menyusun dan melaporkan kinerja pemerintahan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sistem ini juga bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam integrasi data melalui sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (SILPPD) Kementerian Dalam Negeri. Sistem ini dikelola oleh Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

SARAN DAN STRATEGI TINDAK LANJUT LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2024.

- Memperbaiki kualitas laporan kinerja.
- Memanfaatkan informasi laporan kinerja untuk perencanaan periode berikutnya.
- Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.
- Analisis efisiensi penggunaan anggaran.
- Menyusun dan menetapkan SOP atau pedoman teknis pengukuran kinerja.
- Menyelenggarakan evaluasi kinerja.
- Melakukan tindak lanjut untuk memperbaiki atau mengoptimalkan kinerja.

Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhai tugas pengabdian kita sekalian pada Bangsa dan Negara.

Palu , 11 Januari 2025

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH**



Drs. DAHRI SALEH M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660311 198803 1 017

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : MUHAMMAD HUSNI PETTAWALI, S.STP, M.AP

J a b a t a n : Kepala Bagian Pemerintahan.

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : Drs. DAHRI SALEH, M.Si

J a b a t a n : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH**

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN


Drs. DAHRI SALEH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660311 198803 1 017


MUHAMMAD HUSNI PETTAWALI, S.STP, M.AP
Pembina
NIP. 19840501 200212 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	TERSEDIAANYA DATA DUKUNG LPPD SESUAI KETENTUAN OLEH PERANGKAT DAERAH	- PERSENTASE DATA DUKUNG LPPD YANG DILAPORKAN SESUAI KETENTUA	100%
2	TERFASILITASINYA USULAN URUSAN PENATAAN WILAYAH	- PERSENTASE USULAN URUSAN PENATAAN WILAYAH DI TINDAKLANJUTI	100%
3	TERSEDIAANYA DATA DUKUNG LKPJ SESUAI KETENTUAN OLEH PERANGKAT DAERAH	- PERSENTASE DATA DUKUNG LKPJ YANG DILAPORKAN SESUAI KETENTUAN	100%
4	TERSEDIAANYA DATA DUKUNG SPM SESUAI KETENTUAN OLEH PERANGKAT DAERAH	- PERSENTASE DATA DUKUNG SPM YANG DILAPORKAN SESUAI KETENTUAN	100%

PROGRAM

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
- PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

ANGGARAN KETERANGAN
Rp. 2.509.448.464 APBD P

Rp. 3.343.051.536 APBD P

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH**



Drs. DAHRI SALEH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19660311 198803 1 017

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN



MUHAMMAD HUSNI PETTAWALI, S.STP, M.AP
Pembina
NIP. 19840501 200212 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : HASNA ELAM. S. Sos., M.AP
J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : MUHAMMAD HUSNI PETTAWALI, S.STP, M.AP
J a b a t a n : Kepala Bagian Pemerintahan..
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

MUHAMMAD HUSNI PETTAWALI, S.STP, M.AP

Pembina
NIP. 19840501 200212 1 003

Palu, 2024
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

HASNAH ELAM. S.Sos.,M.AP

Pembina
NIP. 19670702 199203 2 014

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelaksanaan Tugas Pemerintahan - Terlaksananya Koordinasi, pengumpulan dan verifikasi data Lintas PD - Tersosialisasinya SPM pada PD - Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pengampu SPM	Presentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan - Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, pengumpulan dan verifikasi data (Desk lintas OPD) - Jumlah PD yang tersosialisasi - Jumlah Aparatur yang meningkat kompetensinya	100% 6 Dokumen Data Dukung 84 PD Kab/Kota & Provinsi 168 Orang

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

- Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum

ANGGARAN

Rp. 762.631.266

Rp. 317.500.000

KETERANGAN

APBD P

APBD P

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN



MUHAMMAD HUSNI PETTAWALI, S.STP, M.AP

Pembina
NIP. 19840501 200212 1 003

**KEPALA SUB BAGIAN
PEMERINTAHAN UMUM**



HASNAH ELAM, S. Sos., M.AP

Pembina
NIP. 19670702 199203 2 014

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : MUHAMAD RIZAL., SE., MT

J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Adm. Pemerintahan Dan Fasilitasi Penataan Wilayah
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : MUHAMMAD HUSNI PETTAWALI, S.STP, M.AP

J a b a t a n : Kepala Bagian Pemerintahan.
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

MUHAMMAD HUSNI PETTAWALI, S.STP, M.AP

Pembina

NIP. 19840501 200212 1 003

Palu, 2024

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA SUB BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN
DAN FASILITASI PENATAAN WILAYAH**

MUHAMAD RIZAL. SE., MT

Pembina

NIP. 19730701 200012 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FASILITASI
PENATAAN WILAYAH

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelaksanaan Tugas Pemerintahan - Terlaksananya Koordinasi, Pengumpulan Dan Verifikasi Data Lintas Pd - Terlaksananya Koordinasi Antar Pemangku Wilayah Penyelesaian Tapal Batas - Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Pemekaran Wilayah Baru - Terlaksananya Evaluasi Usulan Pemekaran Wilayah - Terlaksananya Penamaan Pulau-Pulau Yang Belum Teridentitas - Terlaksananya Koordinasi, Pengumpulan Dan Verifikasi Data Lintas Pd	Presentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan - Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Pengumpulan Dan Verifikasi Data (Desk Lintas Opd) - Persentase Pelaksanaan Koordinasi Yang Dilaksanakan - Jumlah Pelaksanaan Koordinasi - Jumlah Dokumen Evaluasi Pemekaran Wilayah - Umlah Nama Rupa Bumi Yang Di Bakukan - Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Pengumpulan Dan Verifikasi Data (Desk Lintas Opd)	100% 41 Dokumen Data Dukung Pd 100 % 9 Desertada Dob 1 Dokumen Pemekaran 70 % 41 Dokumen Data Dukung Pd

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

- Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
- Fasilitasi Penataan Wilayah

Rp. 762.631.266

APBD P

Rp. 445'131'266

APBD P

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI
 PEMERINTAHAN DAN FASILITASI
 PENATAAN WILAYAH



MUHAMMAD HUSNI PETTAWALI, S.STP, M.AP

Pembina

NIP. 19840501 200212 1 003



MUHAMAD RIZAL, SE., MT

Pembina

NIP. 19730701 200012 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UHRAWI, S.Kom., MM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MUHAMMAD HUSNI PETTAWALI, S.STP, M.AP
Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan.
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

MUHAMMAD HUSNI PETTAWALI, S.STP, M.AP

Pembina

NIP. 19840501 200212 1 003

Palu, 2024

PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

UHRAWI, S.Kom. MM

Pembina

NIP. 19771230 200701 2 014

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah - Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Tersedianya Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja - Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	100% 9 Dokumen 4 Laporan 2 Laporan
2	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Terlaksananya Bimtek ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK	100% 10 Orang
3	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Penggandaan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan Luar Daerah	100% 10 Paket 1 Laporan
4	Terselenggara Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100% 1 Laporan
5	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Tersedianya Sarana dan Prasarana pemeliharaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor	100% 25 Unit

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.422.010	APBD P
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.705.380	APBD P
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.239.800	APBD P
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.410.830	APBD P
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.050.000	APBD P
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48.050.000	APBD P
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.319.023.604	APBD P
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	873.790.604	APBD P
- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	445.233.000	APBD P
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	798.597.850	APBD P
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	798.597.850	APBD P
	292.355.000	APBD P
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	292.355.000	APBD P

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN



MUHAMMAD HUSNI PETTAWALI, S.STP, M.AP

Pembina

NIP. 19840501 200212 1 003

KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA



UHRAWI, S. Kom, MM

Pembina

NIP.19771230 200701 2 014

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : DINA MARIANY MUSTAQIM, S.STP., M.Si

J a b a t a n : Kepala Bagian Otonomi Daerah.

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

N a m a : Drs. DAHRI SALEH, M.Si

J a b a t a n : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH**

Drs. DAHRI SALEH, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660311 198803 1 017

Palu, 2024

PIHAK PERTAMA,

KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH

DINA MARIANY MUSTAQIM, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19810329 200003 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH**

NO	SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	TEREVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	- PERSENTASE REKOMENDASI HASIL EVALUASI LPPD KAB/KOTA YANG DITINDAKLANJUTI	100 %
2	MENINGKATNYA FASILITASI ADM. KDH DAN DPRD BAIK PROV.KAB/KOTA	- PERSENTASE KEBUTUHAN ADM. PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, PAW DAN IZIN ALASAN PENTING KDH DAN DPRD BAIK PROV, KAB/KOTA YANG DIKELUARKAN	100 %
3	TERLAKSANANYA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN OTDA KAB/KOTA	- TERLAKSANANYA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN OTDA KAB/KOTA	100 %

PROGRAM

ANGGARAN KETERANGAN

- PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Rp. 3.343.051.536

APBD P

KEGIATAN

ANGGARAN KETERANGAN

- PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Rp. 1.062.491.000

APBD P

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH**



Drs. DAHRI SALEH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP.19660311 198803 1 017

KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH



DINA MARIANY MUSTAQIM, S. STP.M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19810329 200003 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : RAHMAWATY. SE., M.AP

J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD.
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

N a m a : DINA MARIANY MUSTAQIM, S.STP., M.Si

J a b a t a n : Kepala Bagian Otonomi Daerah.
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH

DINA MARIANY MUSTAQIM. S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19810329 200003 2 001

Palu, 2024

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI
KEPALA DAERAH DAN DPRD**

RAHMAWATY. SE., M.AP

Penata Tingkat I

NIP. 19760812 200701 2 018

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelaksanaan Otonomi Daerah - Terlayannya Surat Permohonan Pengangkatan, Pemberhentian, PAW Dan Izin Alasan Penting Kdh Dan DPRD Baik Prov, Kab/Kota	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah - Persentase Surat Permohonan Pengangkatan, Pemberhentian, PAW Dan Izin Alasan Penting KDH Dan DPRD Baik Prov, Kab/Kota Yang Ditindaklanjuti	100% 100%

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

- Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

ANGGARAN

Rp. 1.062.491.000

Rp. 345.298.000

KETERANGAN

APBD P

APBD P

KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH



DINA MARIANY MUSTAQIM, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19810329 200003 2 001

KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI
KEPALA DAERAH DAN DPRD



RAHMAWATY, SE., M.AP

Penata Tingkat I
NIP. 19760812 200701 2 018

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : RIDWAN ABD RAHIM. S. STP

J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : DINA MARIANY MUSTAQIM. S. STP., M. Si

J a b a t a n : Kepala Bagian Otonomi Daerah.
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH

DINA MARIANY MUSTAQIM. S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19810329 200003 2 001

Palu, 2024

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

RIDWAN ABD RAHIM. S.STP

Penata Tingkat I
NIP. 19810421 200003 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelaksanaan Otonomi Daerah - Terevaluasi Hasil Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota - Tersusunnya Rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota - Terevaluasinya hasil tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah - Jumlah Dokumen Evaluasi LPPD Kab/Kota - Persentase Rekomendasi yang diterbitkan - Jumlah Kab/Kota yang di evaluasi tindaklanjut rekomendasi	100% 13 Dokumen 100 % 13 Kab/Kota

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

- Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Rp. 1.062.491.000

APBD P

Rp. 492.563.000

APBD P

KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH



DINA MARIANY MUSTAQIM, S. STP.M. SI

Pembina Tingkat I

NIP. 19810329 200003 2 001

KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN



RIDWAN ABDUL RAHIM, S.STP

Penata Tingkat I

NIP. 19810421 200003 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. OLVIA SURYA SANDI. SP., M.Si

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan.
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DINA MARIANY MUSTAQIM. S.STP., M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Otonomi Daerah.
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,

KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH

DINA MARIANY MUSTAQIM. S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19810329 200003 2 001

PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN PENGEMBANGAN
OTONOMI DAERAH DAN PENATAAN URUSAN

A OLVIA SURYA SANDI. SP., M.Si

Pembina

NIP. 19750405 200312 2 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
DAN PENATAAN URUSAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah	100%
	- Tersusunya Dokumen pembaharuan data Pengalihan Personil, Pembiayaan, Sarana Dan Prasarana (P3D) Pemerintah Daerah Kab/Kota	- Kab/Kota yang Terbaharui Data Laporan P3D	1 Dokumen
	- Terlaksananya Rapat Koordinasi P3D	- Jumlah Kab/Kota dan PD Provinsi yang mengikuti rapat koordinasi	15 Perwakilan
	- Terlaksannnya Perayaan Hari OTDA	- Jumlah Pelaksanaan Perayaan	1 Kegiatan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

- Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan

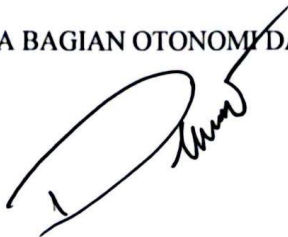
Rp. 1.062.491.000

APBD P

Rp. 224.630.000

APBD P

KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH



DINA MARIANY MUSTAQIM, S. STP.M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19810329 200003 2 001

KEPALA SUB BAGIAN
PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
DAN PENATAAN URUSAN



A OLVIA SURYA SANDI, SP., M.Si

Pembina

NIP. 19750405 200312 2 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : MOHAMMAD AZIR. S. STP., M.Si

J a b a t a n : Kepala Bagian Kerja Sama.

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : Drs. DAHRI SALEH, M.Si

J a b a t a n : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI
DAERAH**

Drs. DAHRI SALEH, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660311 198803 1 017

Palu, 2024

PIHAK PERTAMA,

KEPALA BAGIAN KERJA SAMA

MOHAMMAD AZIR. S. STP. M.Si

Pembina Tingkat 1

NIP. 19770822 199511 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN KERJA SAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Tersusunnya Naskah Kerjasama Dan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	- Persentase naskah yang tersusun sesuai ketentuan	100 %
	- Terjalannya kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	- Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti	100 %

PROGRAM

ANGGARAN KETERANGAN

- PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Rp. 3.343.051.536

APBD P

KEGIATAN

ANGGARAN KETERANGAN

- FASILITASI KERJASAMA DAERAH

Rp. 1.517.929.270

APBD P

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH**



Drs. DAHRI SALEH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19660311 198803 1 017

KEPALA BAGIAN KERJA SAMA



MOHAMMAD AZIR, S. STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770822 199511 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DELZY YUWANA. S.Sos.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kerja Sama Antar Pemerintah
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MOHAMMAD AZIR. S. STP. M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Kerja Sama
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

KEPALA BAGIAN KERJA SAMA

**KEPALA SUB BAGIAN KERJA SAMA ANTAR
PEMERINTAH**

MOHAMMAD AZIR. S. STP. M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19770822 199511 1 001

DELZY YUWANA. S.Sos.

Penata

NIP. 19771104200701 2 022

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Kerja Sama Daerah - Terasilitasinya Usulan Kerjasama Antar Pemerintah - Terasilitasinya Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi KDH/WKDH, Aparatur dan Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota - Tersosialisasinya Tata Cara Naskah Kerjasama antar pemerintah dan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Kab/Kota dan PD Provinsi	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah - Persentase Usulan Kerjasama Antar Pemerintah Yang Ditindaklanjuti - Persentase Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi KDH/WKDH, Aparatur dan Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota yang terfasilitasi - umlah Perwakilan Kab/Kota dan PD Provinsi yang mengikuti sosialisasi	100 % 100 % 100 % 54 Perwakilan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

- Fasilitasi Kerjasama Daerah
- Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah

Rp. 1.517.929.270

APBD P

Rp. 1.075.503.000

APBD P

KEPALA BAGIAN KERJA SAMA

**KEPALA SUB BAGIAN KERJA SAMA
ANTAR PEMERINTAH**



MOHAMMAD AZIR, S. STP., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19770822 199511 1 001



DELZY YUWANA, S.Sos
 Penata
 NIP. 19771104 200701 2 022

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : DAHLIA NURDIN. SH. M. Si
J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : MOHAMMAD AZIR. S. STP. M.Si
J a b a t a n : Kepala Bagian Kerja Sama.
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH

MOHAMMAD AZIR. S. STP. M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19770822 199511 1 001

Palu, 2024

PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI
PELAKSANAAN KERA SAMA

DAHLIA NURDIN. SH. M. Si

Pembina

NIP. 19750929 200211 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Kerja Sama Daerah - Jumlah Dokumen Identifikasi dan Pemetaan Kerjasama Daerah - Terlaksananya desk evaluasi pelaksanaan Kerjasama - Terlaksananya Tindaklanjut hasil evaluasi kerjasama daerah oleh PD Provinsi	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah - Persentase Kerjasama yang teridentifikasi dan terpetakan - Jumlah Kerjasama yang di evaluasi - Jumlah PD yang melakukan tindaklanjut kerjasama	100% 1 Dokumen 29 Naska Kerjasama 41 Perangkat Daerah

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

- Fasilitasi Kerjasama Daerah
- Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Rp. 1.517.929.270

APBD P

Rp. 292.396.270

APBD P

KEPALA BAGIAN KERJA SAMA

**KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI
PELAKSANAAN KERJA SAMA**



MOHAMMAD AZIR, S. STP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19770822 199511 1 001



DAHLIA NURDIN, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19750929 200211 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SELLYAWATI. S. Sos
J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Kerja Sama Badan Usaha/Swasta
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : MOHAMMAD AZIR. S. STP. M.Si
J a b a t a n : Kepala Bagian Kerja Sama
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BAGIAN KERJA SAMA

MOHAMMAD AZIR. S. STP. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770822 199511 1 001

Palu, 2024
PIHAK PERTAMA,

**KEPALA SUB BAGIAN KERJA SAMA BADAN
USAHA/SWASTA**

SELLYAWATI. S. Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19700801 199605 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN KERJASAMA BADAN USAHA/SWASTA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Kerja Sama Daerah - Terfasilitasinya Usulan Kerjasama Badan Usaha Swasta - Tersosialisasinya Tata Cara Naskah Kerjasama badan usaha swasta pada Kab/Kota dan PD Provinsi	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah - Persentase Usulan Kerjasama Badan Usaha Swasta Yang Ditindaklanjuti - Jumlah Perwakilan Kab/Kota dan PD Provinsi yang mengikuti sosialisasi	100% 100% 54 Perwakilan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

- | | | |
|---|-------------------|--------|
| • Fasilitasi Kerjasama Daerah | Rp. 1.517.929.270 | APBD P |
| • Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta | Rp. 150.030.000 | APBD |

KEPALA BAGIAN KERJA SAMA

**KEPALA SUB BAGIAN KERJASAMA
BADAN USAHA/SWASTA**



MOHAMMAD AZIR, S. STP., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19770822 199511 1 001



SELLYAWATI, S.Sos

Penata Tingkat I
NIP. 19700801 199605 2 001

BAB IV

PENUTUP

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyadari di balik berbagai upaya yang dilakukan, banyak tantangan yang masih dihadapi untuk benar benar memenuhi seluruh ekspektasi tentang pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai evaluator mulai dari proses perencanaan sampai kepada proses pelaporan kinerja, yang bertujuan meningkatkan nilai komponen evaluasi kinerja internal

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Laporan Kinerja dari 2 (dua) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar

Rp 5.852.500.000 adalah sebagai tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,50	89,00	101%	Rp 1.593.418.000	Rp 1.585.351.174	99%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	Nilai Kinerja LPPD Provinsi	3,1670	0	0%	Rp 317.500.000	Rp 315.837.419	99%
		Persentase Data Capaian SPM	90,65	91	100%	Rp 445.131.266	Rp 439.454.430	99%
3	Meningkatnya Kaulitas Usulan Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB)	Presentase Usulan Kajian Akademik DOB	100	100	100%	Rp 317.500.000	Rp 315.837.419	99%
4	Meningkatnya Kerjasama Daerah	Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	100	100	100%	Rp 1.077.929.270	Rp 1.046.028.881	97%

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan pada capaian kinerja tahun 2024 pada sasaran yang sesuai dengan "Meningkatnya Kerjasama Daerah" dengan indikator kinerja "Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti" pencapaian sasaran ini sudah dapat di penuhi dengan tingkat capaian kinerja 100%.
2. Indikator Kinerja Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah bahwa perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Tahun 2024 ini bahwa target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap rencana strategis Biro Pemerintahan

dan Otonomi Daerah tercapai target RENSTRA yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja sesuai dengan target RENSTRA.

3. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sepanjang tahun 2024 telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian sangat baik yang terlihat dari rata-rata capaian serapan anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebesar 98,60% dan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% .
4. Capaian realisasi anggaran berada diatas rata-rata nilai 97% sampai dengan 99%
5. Inovasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Kolaborasi Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebuah platform atau sistem yang dirancang untuk membantu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola, menyusun dan melaporkan kinerja pemerintahan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sistem ini juga bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam integrasi data melalui sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (SILPPD) Kementerian Dalam Negeri. Sistem ini dikelola oleh Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

SARAN DAN STRATEGI TINDAK LANJUT LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2024.

- Memperbaiki kualitas laporan kinerja.
- Memanfaatkan informasi laporan kinerja untuk perencanaan periode berikutnya.
- Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.
- Analisis efisiensi penggunaan anggaran.
- Menyusun dan menetapkan SOP atau pedoman teknis pengukuran kinerja.
- Menyelenggarakan evaluasi kinerja.
- Melakukan tindak lanjut untuk memperbaiki atau mengoptimalkan kinerja.

Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhai tugas pengabdian kita sekalian pada Bangsa dan Negara.

Palu , 11 Januari 2025

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH**



Drs. DAHRI SALEH M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660311 198803 1 017

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : MUHAMMAD HUSNI PETTAWALI, S.STP, M.AP

J a b a t a n : Kepala Bagian Pemerintahan.

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : Drs. DAHRI SALEH, M.Si

J a b a t a n : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH**

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN


Drs. DAHRI SALEH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660311 198803 1 017


MUHAMMAD HUSNI PETTAWALI, S.STP, M.AP
Pembina
NIP. 19840501 200212 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	TERSEDIAANYA DATA DUKUNG LPPD SESUAI KETENTUAN OLEH PERANGKAT DAERAH	- PERSENTASE DATA DUKUNG LPPD YANG DILAPORKAN SESUAI KETENTUAN	100%
2	TERFASILITASINYA USULAN URUSAN PENATAAN WILAYAH	- PERSENTASE USULAN URUSAN PENATAAN WILAYAH DI TINDAKLANJUTI	100%
3	TERSEDIAANYA DATA DUKUNG LKPJ SESUAI KETENTUAN OLEH PERANGKAT DAERAH	- PERSENTASE DATA DUKUNG LKPJ YANG DILAPORKAN SESUAI KETENTUAN	100%
4	TERSEDIAANYA DATA DUKUNG SPM SESUAI KETENTUAN OLEH PERANGKAT DAERAH	- PERSENTASE DATA DUKUNG SPM YANG DILAPORKAN SESUAI KETENTUAN	100%

PROGRAM

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
- PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

ANGGARAN KETERANGAN
Rp. 2.509.448.464 APBD P

Rp. 3.343.051.536 APBD P

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH**



Drs. DAHRI SALEH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19660311 198803 1 017

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN



MUHAMMAD HUSNI PETTAWALI, S.STP, M.AP
Pembina
NIP. 19840501 200212 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : HASNA ELAM. S. Sos., M.AP
J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : MUHAMMAD HUSNI PETTAWALI, S.STP, M.AP
J a b a t a n : Kepala Bagian Pemerintahan..
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

MUHAMMAD HUSNI PETTAWALI, S.STP, M.AP

Pembina
NIP. 19840501 200212 1 003

Palu, 2024
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

HASNAH ELAM. S.Sos.,M.AP

Pembina
NIP. 19670702 199203 2 014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelaksanaan Tugas Pemerintahan - Terlaksananya Koordinasi, pengumpulan dan verifikasi data Lintas PD - Tersosialisasinya SPM pada PD - Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pengampu SPM	Presentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan - Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, pengumpulan dan verifikasi data (Desk lintas OPD) - Jumlah PD yang tersosialisasi - Jumlah Aparatur yang meningkat kompetensinya	100% 6 Dokumen Data Dukung 84 PD Kab/Kota & Provinsi 168 Orang

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

- Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum

ANGGARAN

Rp. 762.631.266

Rp. 317.500.000

KETERANGAN

APBD P

APBD P

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN



MUHAMMAD HUSNI PETTAWALI, S.STP, M.AP

Pembina

NIP. 19840501 200212 1 003

**KEPALA SUB BAGIAN
PEMERINTAHAN UMUM**



HASNAH ELAM, S. Sos., M.AP

Pembina

NIP. 19670702 199203 2 014

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : MUHAMAD RIZAL., SE., MT

J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Adm. Pemerintahan Dan Fasilitasi Penataan Wilayah
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : MUHAMMAD HUSNI PETTAWALI, S.STP, M.AP

J a b a t a n : Kepala Bagian Pemerintahan.
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

MUHAMMAD HUSNI PETTAWALI, S.STP, M.AP

Pembina

NIP. 19840501 200212 1 003

Palu, 2024

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA SUB BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN
DAN FASILITASI PENATAAN WILAYAH**

MUHAMAD RIZAL. SE., MT

Pembina

NIP. 19730701 200012 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FASILITASI
PENATAAN WILAYAH**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelaksanaan Tugas Pemerintahan - Terlaksananya Koordinasi, Pengumpulan Dan Verifikasi Data Lintas Pd - Terlaksananya Koordinasi Antar Pemangku Wilayah Penyelesaian Tapal Batas - Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Pemekaran Wilayah Baru - Terlaksananya Evaluasi Usulan Pemekaran Wilayah - Terlaksananya Penamaan Pulau-Pulau Yang Belum Teridentitas - Terlaksananya Koordinasi, Pengumpulan Dan Verifikasi Data Lintas Pd	Presentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan - Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Pengumpulan Dan Verifikasi Data (Desk Lintas Opd) - Persentase Pelaksanaan Koordinasi Yang Dilaksanakan - Jumlah Pelaksanaan Koordinasi - Jumlah Dokumen Evaluasi Pemekaran Wilayah - Umlah Nama Rupa Bumi Yang Di Bakukan - Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Pengumpulan Dan Verifikasi Data (Desk Lintas Opd)	100% 41 Dokumen Data Dukung Pd 100 % 9 Desertada Dob 1 Dokumen Pemekaran 70 % 41 Dokumen Data Dukung Pd

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

- Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
- Fasilitasi Penataan Wilayah

Rp. 762.631.266

APBD P

Rp. 445'131'266

APBD P

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DAN FASILITASI
PENATAAN WILAYAH



MUHAMMAD HUSNI PETTAWALI, S.STP, M.AP

Pembina

NIP. 19840501 200212 1 003



MUHAMAD RIZAL, SE., MT

Pembina

NIP. 19730701 200012 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UHRAWI, S.Kom., MM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MUHAMMAD HUSNI PETTAWALI, S.STP, M.AP
Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan.
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

MUHAMMAD HUSNI PETTAWALI, S.STP, M.AP

Pembina

NIP. 19840501 200212 1 003

Palu, 2024

PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

UHRAWI, S.Kom. MM

Pembina

NIP. 19771230 200701 2 014

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah - Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Tersedianya Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja - Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	100% 9 Dokumen 4 Laporan 2 Laporan
2	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Terlaksananya Bimtek ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK	100% 10 Orang
3	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Penggandaan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan Luar Daerah	100% 10 Paket 1 Laporan
4	Terselenggara Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100% 1 Laporan
5	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Tersedianya Sarana dan Prasarana pemeliharaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor	100% 25 Unit

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.422.010	APBD P
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.705.380	APBD P
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.239.800	APBD P
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.410.830	APBD P
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.050.000	APBD P
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48.050.000	APBD P
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.319.023.604	APBD P
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	873.790.604	APBD P
- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	445.233.000	APBD P
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	798.597.850	APBD P
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	798.597.850	APBD P
	292.355.000	APBD P
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	292.355.000	APBD P

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN



MUHAMMAD HUSNI PETTAWALI, S.STP, M.AP

Pembina

NIP. 19840501 200212 1 003

KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA



UHRAWI, S. Kom, MM

Pembina

NIP.19771230 200701 2 014

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : DINA MARIANY MUSTAQIM, S.STP., M.Si

J a b a t a n : Kepala Bagian Otonomi Daerah.

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

N a m a : Drs. DAHRI SALEH, M.Si

J a b a t a n : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH**

Drs. DAHRI SALEH, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660311 198803 1 017

Palu, 2024

PIHAK PERTAMA,

KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH

DINA MARIANY MUSTAQIM, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19810329 200003 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH**

NO	SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	TEREVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	- PERSENTASE REKOMENDASI HASIL EVALUASI LPPD KAB/KOTA YANG DITINDAKLANJUTI	100 %
2	MENINGKATNYA FASILITASI ADM. KDH DAN DPRD BAIK PROV.KAB/KOTA	- PERSENTASE KEBUTUHAN ADM. PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, PAW DAN IZIN ALASAN PENTING KDH DAN DPRD BAIK PROV, KAB/KOTA YANG DIKELUARKAN	100 %
3	TERLAKSANANYA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN OTDA KAB/KOTA	- TERLAKSANANYA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN OTDA KAB/KOTA	100 %

PROGRAM

ANGGARAN KETERANGAN

- PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Rp. 3.343.051.536

APBD P

KEGIATAN

ANGGARAN KETERANGAN

- PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Rp. 1.062.491.000

APBD P

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH**



Drs. DAHRI SALEH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP.19660311 198803 1 017

KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH



DINA MARIANY MUSTAQIM, S. STP.M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19810329 200003 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : RAHMAWATY. SE., M.AP

J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD.
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

N a m a : DINA MARIANY MUSTAQIM, S.STP., M.Si

J a b a t a n : Kepala Bagian Otonomi Daerah.
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH

DINA MARIANY MUSTAQIM. S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19810329 200003 2 001

Palu, 2024

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI
KEPALA DAERAH DAN DPRD**

RAHMAWATY. SE., M.AP

Penata Tingkat I

NIP. 19760812 200701 2 018

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelaksanaan Otonomi Daerah - Terlayannya Surat Permohonan Pengangkatan, Pemberhentian, PAW Dan Izin Alasan Penting Kdh Dan DPRD Baik Prov, Kab/Kota	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah - Persentase Surat Permohonan Pengangkatan, Pemberhentian, PAW Dan Izin Alasan Penting KDH Dan DPRD Baik Prov, Kab/Kota Yang Ditindaklanjuti	100% 100%

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

- Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

ANGGARAN

Rp. 1.062.491.000

Rp. 345.298.000

KETERANGAN

APBD P

APBD P

KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH



DINA MARIANY MUSTAQIM, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19810329 200003 2 001

KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI
KEPALA DAERAH DAN DPRD



RAHMAWATY, SE., M.AP

Penata Tingkat I
NIP. 19760812 200701 2 018

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : RIDWAN ABD RAHIM. S. STP

J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : DINA MARIANY MUSTAQIM. S. STP., M. Si

J a b a t a n : Kepala Bagian Otonomi Daerah.
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH

DINA MARIANY MUSTAQIM. S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19810329 200003 2 001

Palu, 2024

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

RIDWAN ABD RAHIM. S.STP

Penata Tingkat I
NIP. 19810421 200003 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelaksanaan Otonomi Daerah - Terevaluasi Hasil Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota - Tersusunnya Rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota - Terevaluasinya hasil tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah - Jumlah Dokumen Evaluasi LPPD Kab/Kota - Persentase Rekomendasi yang diterbitkan - Jumlah Kab/Kota yang di evaluasi tindaklanjut rekomendasi	100% 13 Dokumen 100 % 13 Kab/Kota

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

- Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Rp. 1.062.491.000

APBD P

Rp. 492.563.000

APBD P

KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH



DINA MARIANY MUSTAQIM, S. STP.M. SI

Pembina Tingkat I

NIP. 19810329 200003 2 001

KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN



RIDWAN ABDUL RAHIM, S.STP

Penata Tingkat I

NIP. 19810421 200003 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. OLVIA SURYA SANDI. SP., M.Si

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan.
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DINA MARIANY MUSTAQIM. S.STP., M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Otonomi Daerah.
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,

KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH

DINA MARIANY MUSTAQIM. S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19810329 200003 2 001

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA SUB BAGIAN PENGEMBANGAN
OTONOMI DAERAH DAN PENATAAN URUSAN**

A OLVIA SURYA SANDI. SP., M.Si

Pembina

NIP. 19750405 200312 2 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
DAN PENATAAN URUSAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah	100%
	- Tersusunya Dokumen pembaharuan data Pengalihan Personil, Pembiayaan, Sarana Dan Prasarana (P3D) Pemerintah Daerah Kab/Kota	- Kab/Kota yang Terbaharui Data Laporan P3D	1 Dokumen
	- Terlaksananya Rapat Koordinasi P3D	- Jumlah Kab/Kota dan PD Provinsi yang mengikuti rapat koordinasi	15 Perwakilan
	- Terlaksannnya Perayaan Hari OTDA	- Jumlah Pelaksanaan Perayaan	1 Kegiatan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

- Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan

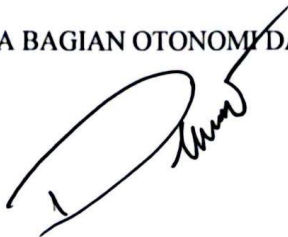
Rp. 1.062.491.000

APBD P

Rp. 224.630.000

APBD P

KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH



DINA MARIANY MUSTAQIM, S. STP.M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19810329 200003 2 001

KEPALA SUB BAGIAN
PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
DAN PENATAAN URUSAN



A OLVIA SURYA SANDI, SP., M.Si

Pembina

NIP. 19750405 200312 2 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : MOHAMMAD AZIR. S. STP., M.Si

J a b a t a n : Kepala Bagian Kerja Sama.

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : Drs. DAHRI SALEH, M.Si

J a b a t a n : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI
DAERAH**

Drs. DAHRI SALEH, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660311 198803 1 017

Palu, 2024

PIHAK PERTAMA,

KEPALA BAGIAN KERJA SAMA

MOHAMMAD AZIR. S. STP. M.Si

Pembina Tingkat 1

NIP. 19770822 199511 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN KERJA SAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Tersusunnya Naskah Kerjasama Dan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	- Persentase naskah yang tersusun sesuai ketentuan	100 %
	- Terjalannya kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	- Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti	100 %

PROGRAM

ANGGARAN KETERANGAN

- PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Rp. 3.343.051.536

APBD P

KEGIATAN

ANGGARAN KETERANGAN

- FASILITASI KERJASAMA DAERAH

Rp. 1.517.929.270

APBD P

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH**



Drs. DAHRI SALEH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19660311 198803 1 017

KEPALA BAGIAN KERJA SAMA



MOHAMMAD AZIR, S. STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770822 199511 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : DELZY YUWANA. S.Sos.

**J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Kerja Sama Antar Pemerintah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA**

N a m a : MOHAMMAD AZIR. S. STP. M.Si

**J a b a t a n : Kepala Bagian Kerja Sama
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

KEPALA BAGIAN KERJA SAMA

KEPALA SUB BAGIAN KERJA SAMA ANTAR
PEMERINTAH

MOHAMMAD AZIR. S. STP. M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19770822 199511 1 001

DELZY YUWANA. S.Sos.

Penata

NIP. 19771104200701 2 022

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Kerja Sama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah	100 %
	- Terfasilitasinya Usulan Kerjasama Antar Pemerintah	- Persentase Usulan Kerjasama Antar Pemerintah Yang Ditindaklanjuti	100 %
	- Terfasilitasinya Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi KDH/WKDH, Aparatur dan Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota	- Persentase Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi KDH/WKDH, Aparatur dan Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota yang terfasilitasi	100 %
	- Tersosialisasinya Tata Cara Naskah Kerjasama antar pemerintah dan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Kab/Kota dan PD Provinsi	- umlah Perwakilan Kab/Kota dan PD Provinsi yang mengikuti sosialisasi	54 Perwakilan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

- Fasilitasi Kerjasama Daerah
- Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah

Rp. 1.517.929.270

APBD P

Rp. 1.075.503.000

APBD P

KEPALA BAGIAN KERJA SAMA

**KEPALA SUB BAGIAN KERJA SAMA
ANTAR PEMERINTAH**



MOHAMMAD AZIR, S. STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770822 199511 1 001



DELZY YUWANA, S.Sos
Penata
NIP. 19771104 200701 2 022

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : DAHLIA NURDIN. SH. M. Si
J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : MOHAMMAD AZIR. S. STP. M.Si
J a b a t a n : Kepala Bagian Kerja Sama.
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH

MOHAMMAD AZIR. S. STP. M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19770822 199511 1 001

Palu, 2024

PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI
PELAKSANAAN KERA SAMA

DAHLIA NURDIN. SH. M. Si

Pembina

NIP. 19750929 200211 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Kerja Sama Daerah - Jumlah Dokumen Identifikasi dan Pemetaan Kerjasama Daerah - Terlaksananya desk evaluasi pelaksanaan Kerjasama - Terlaksananya Tindaklanjut hasil evaluasi kerjasama daerah oleh PD Provinsi	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah - Persentase Kerjasama yang teridentifikasi dan terpetakan - Jumlah Kerjasama yang di evaluasi - Jumlah PD yang melakukan tindaklanjut kerjasama	100% 1 Dokumen 29 Naska Kerjasama 41 Perangkat Daerah

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

- Fasilitasi Kerjasama Daerah
- Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Rp. 1.517.929.270

APBD P

Rp. 292.396.270

APBD P

KEPALA BAGIAN KERJA SAMA

**KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI
PELAKSANAAN KERJA SAMA**



MOHAMMAD AZIR, S. STP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19770822 199511 1 001



DAHLIA NURDIN, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19750929 200211 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SELLYAWATI. S. Sos
J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Kerja Sama Badan Usaha/Swasta
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : MOHAMMAD AZIR. S. STP. M.Si
J a b a t a n : Kepala Bagian Kerja Sama
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BAGIAN KERJA SAMA

MOHAMMAD AZIR. S. STP. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770822 199511 1 001

Palu, 2024
PIHAK PERTAMA,

**KEPALA SUB BAGIAN KERJA SAMA BADAN
USAHA/SWASTA**

SELLYAWATI. S. Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19700801 199605 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN KERJASAMA BADAN USAHA/SWASTA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Kerja Sama Daerah - Terfasilitasinya Usulan Kerjasama Badan Usaha Swasta - Tersosialisasinya Tata Cara Naskah Kerjasama badan usaha swasta pada Kab/Kota dan PD Provinsi	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah - Persentase Usulan Kerjasama Badan Usaha Swasta Yang Ditindaklanjuti - Jumlah Perwakilan Kab/Kota dan PD Provinsi yang mengikuti sosialisasi	100% 100% 54 Perwakilan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

- | | | |
|---|-------------------|--------|
| • Fasilitasi Kerjasama Daerah | Rp. 1.517.929.270 | APBD P |
| • Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta | Rp. 150.030.000 | APBD |

KEPALA BAGIAN KERJA SAMA

**KEPALA SUB BAGIAN KERJASAMA
BADAN USAHA/SWASTA**



MOHAMMAD AZIR, S. STP., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19770822 199511 1 001



SELLYAWATI, S.Sos

Penata Tingkat I
NIP. 19700801 199605 2 001